

PENDIDIKAN AGAMA DAN UPAYA PENGUATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Intan Suryanti

Sekolah Tinggi Teologi Tabgha Batam
intan@st3b.ac.id

Abstract

Religious harmony is an important foundation for social stability and national integration in Indonesia, which is known as a multicultural and multireligious country. This article aims to examine the strategic role of education in building inter-religious harmony through a literature study approach. Using a descriptive qualitative method, this study analyses various academic sources published in the last 10 years that discuss tolerance education, religious moderation, and multicultural education. The results of the study show that formal and non-formal education play a significant role in instilling the values of tolerance, mutual respect, and interfaith dialogue. The practice of interfaith education in elementary schools has proven to be effective in forming an inclusive character from an early age. In the context of Christian religious education, the values of love, forgiveness, and respect for human dignity are the basis of religious moderation that is relevant to a pluralistic society. However, the implementation of interfaith education still faces challenges such as ideological resistance, limited teacher training, and a curriculum that is not fully multicultural. This article recommends the development of an interfaith curriculum based on universal values, teacher training in a multicultural approach, and the integration of interfaith activities in the educational environment. Education that is designed in a contextual and reflective manner can be a transformative instrument in building a peaceful, equitable, and inclusive society.

Keywords: *interfaith education, religious harmony, religious moderation, Christian education, tolerance, multiculturalism*

Abstrak

Kerukunan umat beragama merupakan fondasi penting bagi stabilitas sosial dan integrasi nasional di Indonesia yang dikenal sebagai negara multikultural dan multireligius. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis pendidikan dalam membangun kerukunan antarumat beragama melalui pendekatan studi literatur. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis berbagai sumber akademik terbitan 10 tahun terakhir yang membahas pendidikan toleransi, moderasi beragama, dan pendidikan multikultural. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan formal dan non-formal berperan signifikan dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan dialog lintas iman. Praktik pendidikan lintas agama di sekolah dasar terbukti efektif dalam membentuk karakter inklusif sejak dini. Dalam konteks pendidikan agama Kristen, nilai kasih, pengampunan, dan penghargaan terhadap martabat manusia menjadi dasar moderasi beragama yang relevan untuk masyarakat plural. Namun, implementasi pendidikan lintas agama masih menghadapi tantangan seperti resistensi ideologis, keterbatasan pelatihan guru, dan kurikulum yang belum sepenuhnya multikultural. Artikel ini merekomendasikan pengembangan kurikulum lintas agama yang berbasis nilai-nilai universal, pelatihan guru dalam pendekatan multikultural, serta integrasi kegiatan lintas iman di lingkungan pendidikan. Pendidikan yang dirancang secara kontekstual dan reflektif dapat menjadi instrumen transformatif dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan inklusif.

Kata kunci: pendidikan lintas agama, kerukunan umat beragama, moderasi beragama, pendidikan Kristen, toleransi, multikulturalisme

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan keragaman agama dan budaya cukup besar. Negara ini terdiri dari banyak kelompok etnis, bahasa, dan beberapa agama, menjadikannya salah satu negara paling multikultural dan multi-agama. Keberagaman ini merupakan aset sosial negara namun penuh tantangan dalam menumbuhkan kohesi sosial dan kerukunan beragama.

Dengan kondisi sosial yang plural seperti di Indonesia, diperlukan komitmen dari pemerintah maupun masyarakatnya untuk tetap menjaga kedamaian diantara beragam komunitas agama untuk persatuan dan pembangunan nasionalnya. Kerukunan beragama bukan sekadar cita-cita sosial tetapi tujuan nasional strategis yang menopang stabilitas dan kemajuan bangsa

Di Indonesia ada enam beberapa agama yang diakui secara resmi oleh negara yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta berbagai bentuk kepercayaan lokal yang hidup berdampingan. Keberagaman tersebut merupakan aset nasional yang harus dijaga melalui berbagai pendekatan, salah satunya adalah pendidikan yang mendorong inklusivitas dan sikap toleran.

Kerukunan beragama merupakan fondasi penting bagi stabilitas sosial dan perdamaian di masyarakat yang plural. Stabilitas sosial dan lingkungan yang baik akan mengakibatkan perencanaan pembangunan wilayah akan berjalan dengan baik, demikian sebaliknya. Pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik jika kondisi suatu negara tidak kondusif.

Seperti halnya negara lain yang memiliki pluralisme agama, maka dibutuhkan pendidikan efektif untuk mencegah konflik dan membangun kohesi sosial. Pendidikan, baik formal maupun informal, diakui sebagai kunci

utama dalam membangun kerukunan beragama melalui penanaman nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan dialog lintas iman (Kusuma, A. Prayogo, E. Simamora, 2025)(Shamsuddin & Raza, 2025)

Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan cara berpikir generasi muda (Rabiah, 2019). Melalui proses pembelajaran yang tepat, nilai-nilai seperti toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan semangat hidup berdampingan dapat ditanamkan sejak dini (Yuliana, 2021). Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian ilmu, tetapi juga sebagai ruang pembentukan sikap sosial yang mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan harmonis.

Pendidikan agama memainkan peran penting dalam mempromosikan sikap moderat di kalangan siswa, yang membantu mereka menghormati perbedaan dan hidup dalam harmoni. Ini dicapai melalui tiga pilar utama: buku teks berkualitas, guru yang moderat, dan suasana sekolah yang kondusif (Alhafizh & Dede Setiawan, 2025). Dengan demikian peran Pendidikan dalam meningkatkan mederasi beragama di Indonesia sangatlah penting.

Meski skalanya tidak masif, konflik antarumat beragama masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa upaya membangun kerukunan belum sepenuhnya optimal. Penelitian terdahulu menyatakan, pendekatan pendidikan agama yang eksklusif dan tidak relevan dengan konteks sosial dapat memperkuat sikap intoleran. Sebaliknya, pendekatan yang berbasis nilai universal dan dialog antarbudaya terbukti lebih efektif dalam membentuk sikap terbuka dan saling menghargai (Alhafizh & Dede Setiawan, 2025; Meniria Laoli et al., 2023)

Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, pendidikan multikultural menjadi kebutuhan mendesak. Pendekatan ini tidak hanya mengakui keberagaman sebagai fakta sosial, tetapi juga menjadikannya bagian integral dari proses pembelajaran (Sarnita Sarnita, n.d.) Melalui pendidikan multikultural, peserta didik diharapkan mampu memahami dan menghargai perbedaan agama, budaya, dan tradisi yang ada di sekitarnya.

Pemerintah telah menunjukkan komitmen terhadap kerukunan melalui kebijakan pendidikan, seperti integrasi nilai toleransi dalam Kurikulum 2013 pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Purwati et al., 2022). Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, resistensi sosial, dan kurangnya kompetensi guru dalam menerapkan pendekatan multikultural.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran pendidikan dalam membangun kerukunan antarumat beragama di Indonesia, dengan fokus pada model pendidikan yang efektif, tantangan implementasi, dan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat upaya tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode utama berupa kajian pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis menelaah secara mendalam teori-teori, hasil riset, serta dokumen akademik yang relevan dengan isu pendidikan dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif karena berupaya memahami makna, nilai, serta dinamika sosial yang muncul dalam praktik pendidikan lintas agama. Pendekatan deskriptif digunakan untuk

menyajikan gambaran yang sistematis mengenai peran pendidikan dalam memperkuat kerukunan antarumat beragama berdasarkan sumber-sumber tertulis.

2. Sumber Data

Data penelitian diperoleh dari berbagai literatur, antara lain:

- Artikel jurnal ilmiah terindeks (Scopus, DOAJ, Garuda, Google Scholar) yang terbit dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
- Buku akademik serta dokumen kebijakan pendidikan nasional yang membahas moderasi beragama dan pendidikan multikultural.
- Laporan penelitian maupun publikasi resmi dari lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

- Penelusuran sistematis terhadap artikel dan jurnal dengan kata kunci seperti kerukunan umat beragama, pendidikan toleransi, moderasi beragama, dan pendidikan multikultural.
- Seleksi literatur berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, serta keterbaruan (maksimal 10 tahun terakhir).
- Pengelompokan literatur ke dalam tema-tema tertentu, misalnya peran pendidikan formal, strategi pedagogis, hambatan implementasi, dan dampak sosial.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis), yang meliputi:

- Identifikasi tema-tema utama dari literatur yang dikaji.
- Penyusunan sintesis dari berbagai pandangan dan temuan penelitian.
- Penarikan kesimpulan mengenai pola, keterkaitan, serta

kontribusi pendidikan terhadap kerukunan antarumat beragama.

5. Keabsahan Data

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas, penelitian ini menerapkan beberapa langkah, antara lain:

- Triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai literatur yang berbeda.
- Audit trail, berupa pencatatan proses penelusuran dan seleksi literatur secara transparan.
- Klarifikasi konsep dan definisi operasional, agar sesuai dengan kerangka teori yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Pendidikan sebagai Instrumen Sosial untuk Membangun Kerukunan

1.1 Peran Pendidikan dalam Mempromosikan Moderasi Beragama

Pendidikan memiliki posisi strategis dalam menumbuhkan kesadaran sosial serta membangun nilai kebersamaan di tengah masyarakat yang beragam. Di Indonesia, pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan solidaritas antaragama. Hamidah (2016) menegaskan bahwa strategi membangun kerukunan dapat dilakukan melalui penguatan ukhuwah, penyaringan informasi yang berpotensi memicu konflik, serta penerapan prinsip keadilan sosial sebagai dasar hubungan antar kelompok (Hamidah, 2016). Dengan adanya penyaringan informasi maka isu-isu yang berkembang dapat di dalam Masyarakat dapat dikendalikan sehingga mengurangi terjadinya pergesekan.

Institusi pendidikan formal, baik sekolah maupun perguruan tinggi, menjadi ruang awal pembentukan sikap inklusif. Penelitian Dewi et al. (2021) memperlihatkan bahwa kegiatan keagamaan yang dirancang secara terbuka dan kolaboratif di sekolah dasar mampu menumbuhkan sikap saling menghormati di antara siswa yang berbeda keyakinan (Dewi et al., 2021).

Interaksi lintas iman yang difasilitasi secara pedagogis terbukti memperkuat kohesi sosial sekaligus mengurangi prasangka.

Lebih jauh, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter dan nilai. Oleh karena itu, kurikulum dan metode pembelajaran perlu dirancang secara kontekstual, sesuai dengan realitas sosial Indonesia yang plural, serta reflektif terhadap kebutuhan masyarakat majemuk (Jaenudin et al., 2024).

Sebagai contoh, pendidikan di sekolah-sekolah swasta berbasis agama di Yogyakarta dan Sumatera Barat menunjukkan cara baru dalam mengajarkan toleransi antaragama, yang dapat meningkatkan pemahaman dan kerukunan antaragama (Wafa' et al., 2024). Peran penting ini sangat mempengaruhi kondisi kerukunan beragama.

Pendidikan agama memegang tempat yang menonjol dalam sistem pendidikan Indonesia. Diamanatkan dari tingkat sekolah dasar hingga pendidikan tinggi untuk menanamkan pengetahuan agama dan nilai-nilai moral yang konsisten dengan latar belakang iman siswa. Namun, struktur kurikulum pendidikan agama sering dikritik karena fokus doktrinalnya yang sempit, yang cenderung menggarisbawahi ajaran eksklusif daripada nilai-nilai inklusif dan pluralistik.

Eksklusivitas ini berisiko menumbuhkan sikap keagamaan yang terpencil daripada toleransi dan pemahaman lintas agama. Literatur menunjuk pada paradigma yang berlaku yang memandang pendidikan agama di Indonesia sebagai penekanan pada pengajaran doktrin berbasis agama yang sering terlepas dari realitas sosial-agama masyarakat Indonesia yang beragam (Ghazali & Busro, 2017).

Toleransi pada Siswa Strategi pengajaran yang efektif untuk menumbuhkan toleransi dalam konteks pendidikan mencakup konten kurikuler yang berfokus pada rasa hormat, kerja sama, dan pemahaman tentang

beragam keyakinan. Program pendidikan yang mendorong dialog antaragama, proyek bersama, dan pedagogi responsif budaya telah menunjukkan keberhasilan dalam mempromosikan toleransi (Hafiz et al., 2024).

Sikap dan kompetensi guru memainkan peran penting dalam menyampaikan konten tersebut secara efektif. Pelatihan guru yang memelihara empati dan pemahaman pluralistik sangat penting untuk mempertahankan lingkungan kelas yang toleran (Ayu & Dirgantoro, 2023). Dengan demikian, peran guru dan juga menggabungkan media digital dan metode interaktif, seperti debat dan presentasi multimedia, memajukan keterlibatan dan kesadaran siswa akan keragaman dan moderasi agama.

1.2 Tantangan Implementasi Pendidikan Lintas Agama

Pelaksanaan pendidikan lintas agama di Indonesia masih menghadapi hambatan, baik dari sisi struktural maupun kultural. Beberapa di antaranya adalah resistensi ideologis dari kelompok konservatif, keterbatasan pelatihan guru dalam pendekatan multikultural, serta kurikulum yang cenderung monolitik dan normatif. Selain itu, pengaruh media sosial dan politik identitas turut memperkuat segregasi sosial berbasis agama.

Tantangan ini diperparah oleh kerangka hukum dan kebijakan kurikulum yang telah mempertahankan pendekatan mono-agama yang dominan mendukung agama tertentu, yang membatasi paparan siswa terhadap dialog antaragama dan perspektif pluralistik (Gaudiawan et al., 2023). Penilaian kritis terhadap undang-undang yang ada terkait pendidikan agama menemukan bahwa orientasi eksklusif semacam itu dapat secara tidak sengaja memperkuat perpecahan daripada menguranginya, sehingga menghalangi upaya menuju harmoni nasional (Majid, 2020).

Nurhadi (2019) menegaskan bahwa kerukunan umat beragama harus

berlandaskan pada prinsip konstitusional dan historis, seperti Piagam Madinah dan Pasal 29 UUD 1945 (Nurhadi, 2019). Pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan sosial, dapat menjadi solusi untuk mengatasi fragmentasi sosial berbasis agama. Selain itu, konteks lokal juga perlu diperhatikan. Di wilayah yang memiliki sejarah konflik atau segregasi, pendekatan pendidikan yang sensitif terhadap budaya dan berbasis komunitas menjadi kunci keberhasilan dalam membangun kerukunan.

Terlepas dari kemajuan, sistem pendidikan menghadapi beberapa kendala dalam memastikan toleransi antar siswa secara efektif. Ada tandatanda intoleransi dan radikalisme yang nyata di dalam lembaga pendidikan, dipengaruhi oleh faktor-faktor internal peserta didik, seperti keyakinan yang terbentuk sebelumnya, dan eksternal, termasuk tekanan masyarakat dan sikap guru (Peter, 2020). Dan yang sangat memperparah kondisi ini adalah ketegangan antara ajaran doktrin yang ketat dan seruan untuk keterbukaan dan inklusivitas, menciptakan dilema pedagogis bagi pendidik dan administrasi sekolah (Gultom & Pardede, 2023). Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan reformasi kurikulum, pengembangan profesional guru, dan keterlibatan Masyarakat.

2. Model Pendidikan Agama yang Inklusif dan Multikultural

Keilmuan kontemporer semakin menganjurkan model pendidikan agama yang menekankan inklusivitas dan multikulturalisme daripada eksklusivisme. Pendidikan agama inklusif menantang pendekatan monokultural atau mono-agama tradisional dengan menumbuhkan sikap yang menegaskan martabat yang sama dari semua komunitas agama. Pendidikan semacam itu mengedepankan nilai-nilai seperti saling menghormati, empati, perdamaian, dan kerja sama, selaras dengan realitas

multikultural Indonesia. Pendidikan agama Kristen, misalnya, telah dieksplorasi sebagai studi kasus yang menunjukkan efektivitas visi pluralistik yang memelihara toleransi dan pemahaman di antara siswa dari berbagai latar belakang (Rantung, 2024)

Dalam nada yang sama, pendidikan agama inklusif diposisikan sebagai paradigma transformatif yang dapat mendefinisikan ulang identitas agama dengan mendorong kepercayaan dan pengakuan lintas agama daripada perpecahan (Larassati, 2020). Selain itu, konsep inklusivisme melawan kecenderungan eksklusivis dan mendukung pendekatan multikultural yang mendorong dialog dan koeksistensi damai, yang dipandang sebagai dasar dari filsafat nasional Pancasila Indonesia (Risladiba & Ramdhani, 2021)

2.1 Keadaan Saat Ini dan Kritik terhadap Pendidikan Monoagama

Terlepas dari aspirasi terhadap inklusivitas, pendekatan pendidikan yang dominan di Indonesia sebagian besar tetap mono-religius. Model ini mengotak-kotakkan pendidikan agama berdasarkan keyakinan individu dan membatasi paparan siswa terhadap agama lain. Studi empiris menyoroti bahwa paradigma mono-agama semacam itu dapat melanggengkan intoleransi dan merusak upaya untuk membangun masyarakat inklusif. Landasan hukum untuk ini sebagian terletak pada UU No. 20/2003 dan peraturan terkait, yang melembagakan pendidikan khusus agama, terkadang meminggirkan agama minoritas (Majid, 2020)

2.2 Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Kristen

Dalam pendidikan agama Kristen, moderasi beragama diwujudkan melalui penekanan pada nilai kasih, pengampunan, dan pelayanan yang menjadi inti ajaran Yesus Kristus. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan landasan untuk membangun sikap toleran dan

keterbukaan dalam berdialog dengan pemeluk agama lain. Pinat et al (2020) menekankan bahwa pendidikan Kristen yang berorientasi pada kasih dan inklusivitas mampu membentuk karakter peserta didik yang menghargai keberagaman serta menolak kekerasan atas nama agama (Pinat et al., 2020).

Konsep imago Dei—bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah—mendorong penghormatan terhadap martabat semua orang tanpa memandang latar belakang agama. Prinsip ini sejalan dengan teologi publik yang menekankan keterlibatan umat Kristen dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan inklusif (Vinsen, 2020).

Meski demikian, tantangan tetap ada. Kurikulum yang terlalu eksklusif atau apologetik berpotensi memperkuat sekat identitas dan menghambat dialog lintas iman. Karena itu, diperlukan pendekatan pedagogis yang mengintegrasikan teologi kontekstual, pendidikan multikultural, serta praktik lintas agama dalam proses pembelajaran.

2.3 Praktik Inovatif dalam Pesantren dan Pendekatan Pendidikan Islam

Berbeda dengan model mono-religius yang lazim, pesantren telah muncul sebagai tempat inovatif untuk menumbuhkan nilai-nilai pluralistik melalui pendidikan. Pesantren secara tradisional berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama tetapi semakin memasukkan kurikulum yang menekankan moderasi, toleransi, dan kewarganegaraan demokratis dalam menanggapi realitas sosial.

Studi tentang pesantren mengungkapkan bahwa lembaga-lembaga ini secara aktif menginternalisasi nilai-nilai pluralistik dengan mengintegrasikannya ke dalam desain instruksional dan budaya sekolah (Rohman, 2017). Selain itu, pendekatan pendidikan Islam berdasarkan prinsip-prinsip multikultural terbukti memperkuat pemahaman dan penerimaan siswa terhadap keragaman agama, secara langsung berkontribusi

pada moderasi dan harmoni (Arikarani et al., 2025). Praktik pendidikan progresif dalam lembaga Islam ini menunjukkan bahwa pendidikan agama dapat direformasi dari dalam untuk berfungsi sebagai alat yang ampuh melawan radikalisme dan sektarianisme.

Pesantren di Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan moderasi agama yang mendorong pemahaman dan kolaborasi antaragama (Athoillah et al., 2024). Inisiatif ini termasuk pendidikan antaragama dalam kurikulum, peningkatan keterampilan berpikir kritis, dan promosi praktik kesetaraan gender. Pendidikan di pesantren yang baik membantu pengembangan pemikiran moderasi di kalangan siswa maupun lingkungannya.

Dengan demikian pesantren berperan penting dalam mempromosikan toleransi antaragama di kalangan siswa maupun mahasiswa di lingkungan pendidikan Islam, dengan menekankan penghormatan terhadap praktik agama yang beragam dan sikap terbuka.

2.4 Pengukuran dan Hasil Pendidikan Toleransi

Menilai efektivitas pendidikan toleransi melibatkan berbagai metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian survei di sekolah dan pesantren memberikan wawasan tentang sikap keagamaan siswa dan bagaimana ini berkembang di bawah pengaturan pendidikan yang berbeda (Yusuf Prasetyawan & Ma'rifataini, 2021). Penelitian telah melaporkan berbagai tingkat keberhasilan, dengan siswa pesantren sering menunjukkan toleransi yang lebih besar mungkin karena kurikulum pluralistik dan budaya sekolah (Yusuf Prasetyawan & Ma'rifataini, 2021). Desain eksperimental yang menguji bahan ajar inklusif juga menunjukkan pengurangan yang terukur dalam sikap radikal dan peningkatan toleransi beragama, menyoroti pentingnya intervensi pendidikan yang dirancang dengan baik.

3. Peran dan Kompetensi Guru dalam Pendidikan dan Moderasi Agama

3.1 Guru sebagai Moderator Pemahaman Agama

Guru adalah agen penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama. Kualitas pengetahuan guru, profesionalisme, dan pendekatan pedagogis sangat mempengaruhi keberhasilan upaya moderasi dalam pendidikan (Chyquitita, 2024). Pengembangan profesional yang berkelanjutan, termasuk pelatihan tentang pluralisme dan kompetensi antaragama, membekali guru untuk menavigasi pengaturan kelas yang kompleks dan mengatasi pandangan radikal atau intoleran secara efektif (Walad et al., 2024). Mengintegrasikan moderasi ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler semakin memberdayakan guru untuk mencontohkan dan memperkuat nilai-nilai ini.

3.2 Tantangan yang Dihadapi oleh Guru di Ruang Kelas yang Beragam Pendidik menghadapi tantangan substansial, termasuk kompetensi antaragama yang terbatas dan mengelola beragam sikap siswa yang dibentuk oleh pengaruh masyarakat eksternal. Kesulitan ini diperburuk oleh kurangnya sumber daya dan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk menerapkan kurikulum inklusif dengan sukses [28]. Selain itu, guru sering menghadapi penolakan atau tekanan dari anggota masyarakat yang lebih memilih pengajaran agama eksklusif, memperumit upaya menuju pendidikan toleransi [9]. Mengatasi tantangan ini membutuhkan intervensi kebijakan yang ditargetkan dan mekanisme kelembagaan untuk mendukung pendidik.

3.3 Strategi untuk Memberdayakan Guru untuk Pendidikan Moderat yang Efektif

Pemberdayaan guru melibatkan reformasi kurikulum yang sistematis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip moderasi dan kegiatan ekstrakurikuler yang terorganisir yang memperkuat

ajaran ini. Program yang memberikan pengetahuan dan keterampilan terbaru tentang tren sosial dan teknologi yang muncul memungkinkan guru untuk tetap efektif dalam konteks yang berubah dengan cepat [16]. Kemitraan kolaboratif antara sekolah, komunitas agama, dan badan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk pendidikan moderasi [19]. Jalur semacam itu membantu memastikan bahwa pendidik agama dipersiapkan dengan baik untuk peran sosial penting mereka.

4. Inisiatif dan Kebijakan Pemerintah tentang Moderasi Beragama

Menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh ekstremisme agama dan fragmentasi sosial, pemerintah Indonesia mencanangkan promosi moderasi pada tahun 2019 (Kemenag, 2019). Inisiatif ini berusaha untuk memperkuat komitmen nasional terhadap toleransi, anti-kekerasan, dan akomodasi budaya, membentuk tulang punggung kebijakan stabilitas nasional.

Komponen penting adalah pembentukan forum seperti FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), yang beroperasi di tingkat provinsi untuk menengahi konflik dan mempromosikan dialog antaragama (Purwandari et al., 2022). Meskipun upaya pemerintah ini mencerminkan sikap proaktif, tantangan tetap ada dalam penegakan kebijakan dan penerimaan publik. Pengembangan berkelanjutan dalam program-program ini diperlukan untuk meningkatkan dampaknya, terutama di berbagai konteks local.

5. Faktor Sosial dan Budaya yang Mempengaruhi Kerukunan Beragama

5.1 Peran Teori Agama dan Pertukaran Sosial dalam Harmoni

Ajaran agama menetapkan nilai-nilai yang mempromosikan kerja sama dan kerukunan sosial berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan. Teori pertukaran sosial menjelaskan bahwa interaksi manusia dibentuk dengan memaksimalkan imbalan dan meminimalkan biaya, sebuah gagasan

yang berlaku untuk hubungan kelompok agama. Studi etnografi dari Manado menggambarkan bagaimana pertukaran sosial antaretnis yang didasarkan pada nilai-nilai agama bersama memfasilitasi koeksistensi damai dan rasa hormat di antara berbagai kelompok (Sari, 2018). Kerangka ini menggarisbawahi fungsi instrumental nilai-nilai agama dalam menciptakan lingkungan yang menguntungkan kerukunan beragama.

5.2 Dampak Tradisi dan Praktik Sosial Lokal

Praktik budaya lokal dapat secara signifikan mempengaruhi kerukunan beragama. Tradisi seperti sedekah bumi tidak hanya mewujudkan kerja sama dan saling membantu tetapi juga memperkuat toleransi dan persatuan antar umat beragama (Taufiq et al., 2023). Ritual ini berfungsi sebagai perekat sosial, mengintegrasikan beragam kelompok agama melalui warisan budaya bersama dan partisipasi kolektif, mengurangi potensi konflik. Tanggapan masyarakat terhadap tradisi ini sering mencerminkan penerimaan dan apresiasi yang luas, melampaui batas-batas agama dan menumbuhkan inklusivitas ideologis.

5.3 Pengaruh Media, Hukum, dan Ruang Digital

Peran media dan instrumen hukum, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dalam membentuk kerukunan beragama sangat signifikan dan kompleks. Sementara UU ITE bertujuan untuk membatasi ujaran kebencian dan mempromosikan kehidupan religius yang harmonis, analisis sosiologis mengungkapkan keterbatasan dalam penegakan praktisnya, seringkali menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan seperti pelaporan hukum timbal balik atau penyalahgunaan dalam perselisihan pribadi (Nabilah et al., 2022). Dinamika ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mengatur ruang digital untuk mencegah intoleransi tanpa melanggar kebebasan, menunjukkan

perlunya kerangka hukum dan pendidikan publik yang bernuansa.

6. Rekomendasi Strategis untuk Pendidikan Kerukunan

Berdasarkan hasil kajian literatur, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat memperkuat peran pendidikan dalam membangun kerukunan antarumat beragama, antara lain:

- Merancang kurikulum lintas agama yang menekankan nilai-nilai universal seperti kasih, keadilan, dan perdamaian.
- Memberikan pelatihan bagi guru agar mampu menerapkan pendekatan multikultural, dialogis, dan kontekstual.
- Mengintegrasikan kegiatan lintas iman, seperti diskusi antaragama, kunjungan ke rumah ibadah, dan proyek sosial bersama.
- Meningkatkan literasi digital dan etika bermedia untuk mencegah penyebaran hoaks serta ujaran kebencian berbasis agama.
- Membangun kolaborasi antara lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan guna menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif bagi kerukunan.
- Rekomendasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan melalui kebijakan pendidikan nasional maupun inisiatif lokal berbasis komunitas.

SIMPULAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat kerukunan umat beragama di Indonesia yang multikultural dan multireligius. Dengan pendekatan yang kontekstual, inklusif, dan berbasis nilai, pendidikan dapat menjadi sarana transformasi sosial yang menumbuhkan sikap toleran, saling menghargai, serta membuka ruang dialog antariman sejak dini.

Kajian literatur memperlihatkan bahwa pendidikan formal maupun non-

formal berkontribusi besar dalam membentuk karakter peserta didik yang terbuka terhadap keberagaman. Praktik pendidikan lintas agama di sekolah dasar (Dewi et al., 2021) dan strategi sosial yang ditawarkan oleh Mayasarah & Bakhtiar (2020) menunjukkan bahwa pendidikan mampu memperkuat kohesi sosial sekaligus mencegah konflik berbasis agama.

Dalam konteks pendidikan Kristen, nilai kasih, pengampunan, dan penghargaan terhadap martabat manusia menjadi fondasi penting bagi moderasi beragama. Seperti yang dijelaskan Sitorus (2022), pendekatan teologi publik dan konsep imago Dei dapat memperkuat relasi lintas iman serta mendorong keterlibatan aktif dalam membangun masyarakat damai. Meski demikian, implementasi pendidikan lintas agama masih menghadapi tantangan, seperti resistensi ideologis, keterbatasan kompetensi guru, dan kurikulum yang belum sepenuhnya multikultural. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas pendidik, serta kerja sama lintas lembaga untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung kerukunan.

Secara keseluruhan, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai ruang pembentukan nilai dan karakter yang menopang kehidupan bersama yang damai, adil, dan inklusif. Dalam konteks Indonesia, pendidikan yang mengintegrasikan moderasi beragama dan nilai pluralisme merupakan kunci utama dalam menjaga serta memperkuat kerukunan umat beragama

DAFTAR PUSTAKA

Alhafizh, I., & Dede Setiawan. (2025). *Pendidikan Moderasi Beragama sebagai Pilar Penguatan Karakter dan Toleransi di Sekolah*.

Andragogi: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 5(1), 207–221.
<https://doi.org/10.31538/adrg.v5i1.1987>

Arikarani, Y., Suradi, S., Ngimadudin, N., & Wulandari, Y. (2025).

- Pendidikan Agama Islam Multikultural: Konsep, Nilai dan Praktiknya di Lingkungan Madrasah. *Ej*, 7(2), 233–254. <https://doi.org/10.37092/ej.v7i2.993>
- Athoillah, M., Rahman, A. S., Firdaus, A. S., & Septiadi, M. A. (2024). POLICIES AND PRACTICES RELIGIOUS MODERATION IN PESANTREN. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 387–396. <https://doi.org/10.15575/jpi.v10i2.27543>
- Ayu, P., & Dirgantoro, K. (2023). GURU SEBAGAI TELADAN DALAM MENUMBUHKAN SIKAP TOLERANSI MURID DI KELAS. *WASKITA Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 7(1), 62–80. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2023.007.01.5>
- Chyquitita, T. (2024). Meningkatkan kualitas pengajaran: Menyikapi tantangan profesionalisme guru di masa kini. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 3(3). <https://doi.org/10.55904/nautical.v3i3.1309>
- Dewi, L., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Penanaman Sikap Toleransi Antar Umat Beragama di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5 Nomor 3.
- Gaudiawan, A. V. E., Christiani, T. K., & Kuswanjono, A. (2023). Modify Indonesian Catholic Religious Education from Mono-Religious to Interreligious Education. *Journal Of Asian Orientation In Theology*, Vol 5, No 1.
- Ghazali, A. M., & Busro, B. (2017). *Pendidikan Islam dalam Dinamika Kehidupan Beragama di Indonesia*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:165549957>
- Gultom, F., & Pardede, M. (2023). Dilema Pendidikan Inklusif: Akomodasi Kebebasan Beragama dan Pengarusutamakan Kesetaraan Siswa. *All Fields of Science Journal Liaison Academia*
- and Sosity, 3(4), 141–146. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v3i4.702>
- Hafiz, A., Romdaniah, L., Ahmad Nizar, R., & Mauliza, S. (2024). Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural: Inisiatif Pendidikan, Kebijakan Publik, dan Peran Media dalam Membentuk Sikap Toleransi. *Rayah Al-Islam*, 8(1), 120–130. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.916>
- Hamidah. (2016). Strategi Membangun Kerukunan Umat Beragama . *Wardah*, Vol. 17 No. 2.
- Jaenudin, E., Al Fajar, F. F., Ruswandi, U., & Nahar, A. S. (2024). PLURALISME DAN MULTIKULTURALISME: BAGAIMANA TANTANGAN DAN PELUANG PENDIDIKAN DI INDONESIA? *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 61–68. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.357>
- Kemenag. (2019, September 5). *LHS dan Moderasi Beragama*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kusuma, A. Prayogo, E. Simamora, N. (2025). Peran Pemerintah dalam Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. *Jurist Diction Law Journal*, 8 No. 2. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17619>
- Larassati, M. A. (2020). PENDEKATAN INKLUSIF DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *KAGANGAK KOMUNIKA: Journal of Communication Science*, 2(1), 64–67. <https://doi.org/10.36761/kagangakomunika.v2i1.628>
- Majid, A. N. (2020). ANALISIS KRITIS PROBLEMATIKA HAK BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA. *Reflektika*.

- https://api.semanticscholar.org/CorpusID:244341909
- Meniria Iaoli, Zai, L. S., Marampa, E. R., & Undras, I. (2023). Moderasi Beragama: Upaya Guru Pendidikan Agama Kristen Mencegah Sikap Intoleran Pada Remaja. *Vox Dei: Jurnal Teologi Dan Pastoral*, 4(1), 99–111. <https://doi.org/10.46408/vxd.v4i1.232>
- Nabilah, W., Putri, D., Octavia, N. 'Aini, Rizal, D., & Warman, A. B. (2022). Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) terhadap Kerukunan Kehidupan Beragama di Ruang Digital. *Dialog*, 45(1), 69–80. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.527>
- Nurhadi. (2019). Ideologi Konstitusi Piagam Madinah dan Relevansinya dengan Ideologi Pancasila. *Volksgeist*, Vol. 2 No. 1.
- Peter, R. (2020). PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM MEMBANGUN WAWASAN KEBANGSAAN MENGHADAPI ISU INTOLERANSI DAN RADIKALISME. *VOX DEI: Jurnal Teologi Dan Pastoral*, 1(2), 89–103. <https://doi.org/10.46408/vxd.v1i2.13>
- Pinat, N., Tari, E., & Pasande, P. (2020). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK . KAPATA: *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen, Volume 1, Nomor 2*, 77–88.
- Purwandari, R., Aprilia, N., & Sir, T. A. K. (2022). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan. *JOURNAL OF ISLAMIC EDUCATION*, Vol. 7 No. 2.
- Purwati, P., Darisman, D., & Faiz, A. (2022). Tinjauan Pustaka: Pentingnya Menumbuhkan Nilai Toleransi dalam Praksis Pendidikan. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 3729–3735. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2733>
- Rabiah, S. (2019). Character Education through Indonesian Language Course on Higher Education. *Journal of Physics: Conference Series*, 1339(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1339/1/012069>
- Rantung, D. A. (2024). A proposal of multicultural relation: Christian religious education and religious moderation. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 80(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.9868>
- Risladiba, R., & Ramdhani, S. (2021). PANCASILA DAN MULTIKULTURALISME. *Eduksos : Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 10(1). <https://doi.org/10.24235/edueksos.v10i1.8402>
- Rohman, A. (2017). Pesantren as a Basis for Internalization of Pluralistic Values for Preparing a Democratic Citizens in a Diverse Society. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(2), 419. <https://doi.org/10.21580/ws.25.2.1324>
- Sari, W. P. (2018). STUDI PERTUKARAN SOSIAL DAN PERAN NILAI AGAMA DALAM MENJAGA KERUKUNAN ANTAR KELOMPOK UMAT BERAGAMA DI MANADO. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 11(1), 96. <https://doi.org/10.14421/pjk.v11i1.1419>
- Sarnita Sarnita, E. T. A. (n.d.). Pertimbangan Multikultural Dalam Pengembangan Kurikulum Untuk Menghadapi Keanekaragaman Sisw. *Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)*, Vol. 4 No. 11 November 2023.
- Shamsuddin, N., & Raza, S. (2025). Analyzing Peace Narratives: Content Analysis of Pakistan

- Studies Curricula and Textbooks at Secondary and Higher Secondary Levels. *Journal of Management Practices, Humanities and Social Sciences (JMPHSS)*, 9(1), 45 – 57.
<https://doi.org/10.33152/jmphss-9.1.4>
- Taufiq, A. M., Rosyad, R., & Kuswana, D. (2023). Dampak Tradisi Sedekah Bumi terhadap Kerukunan Umat Beragama di Blitar, Jawa Timur. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(1), 117–130.
<https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.24271>
- Vinsen, Y. E. (2020). Konsep 'Imago Dei' Emmanuel Levinas. *Focus* , Vol. 1, No. 1, 15–20.
- 'Wafa', M., Faidhoh, U., Khanifudin, K., Hidayati, F., Salim, A., & Suyuti, I. (2024). Harmoni Dalam Keragaman: Eksplorasi Interaksi dan Toleransi Lintas Agama di Sekolah Dasar di Malang dan Yogyakarta. *Literasi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15(1), 96.
[https://doi.org/10.21927/literasi.2024.15\(1\).94-115](https://doi.org/10.21927/literasi.2024.15(1).94-115)
- Walad, M., Dewi, N. W. R., Windayani, N. L. I., Mudana, I. W., & Lasmawan, I. W. (2024). PENDEKATAN PLURALISME AGAMA DALAM PENDIDIKAN DI INDONESIA: TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 11(3), 871–886.
<https://doi.org/10.38048/jipcb.v11i3.3749>
- Yuliana, Y. (2021). *Menjaga Kerukunan dalam Multikulturalisme Beragama*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:236595090>
- Yusuf Prasetyawan, A., & Ma'rifataini, L. (2021). Sikap Keberagamaan Siswa di Sekolah Islam Terpadu. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 6(2), 424–443.
[https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2021.vol6\(2\).7760](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2021.vol6(2).7760)